



**BUPATIBONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK NON FISIK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan penyesuaian rincian Belanja untuk Upaya Kesehatan bersifat Promotif dan Preventif;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK NON FISIK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1638/KEUDA Tanggal 26 Februari 2021 Perihal Penjelasan Mengenai Penyesuaian Iuran Jaminan Kesehatan Pada Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
32. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 906/3155/keuda Tanggal 04 Mei 2021 Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK NonFisik Bidang Kesehatan Menu Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2021;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
37. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2012 Nomor 1);
38. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 2.305.170.393.786,00	
Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. (0,00)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 2.305.170.393.786,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 2.869.560.289.945,00	
b. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. (200.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 2.669.560.289.945,00
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan		Rp. <u>(200.000.000.000,00)</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 579.389.896.159,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. (200.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 379.389.896.159,00
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 15.000.000.000,00	
2. Bertambah/ (Berkurang))	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 15.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. <u>364.389.896.159,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan	Rp. 0,00

2. Rincian perubahan penjabaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatur dalam lampiran Peraturan ini.

3. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH	
TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
PERUNDANG-UNDANGAN	
1. D.	MUH. YAMIN AT. M. SI
2. H.	ANDI ISLAMUDDIN, S. Sgk, NIM
3.	ANWAR, SH., M. SI, MH
4.	A. ERNI, SH., M. SI

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 17 Mei 2021

BUPATI BONE, 



A. FAHSAR M. PADJALANGI 

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal, 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 20

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR : 20 TAHUN 2021

TANGGAL : 17 MEI 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
RINGKASAN PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BONE NOMOR TENTANG PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

NO URUT	URAIAN	J U M L A H (Rp.)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.305.170.393.786,00	2.305.170.393.786,00	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	246.916.393.819,00	246.916.393.819,00	0,00	0,00
4.1.1	Pajak Daerah	53.902.080.493,00	53.902.080.493,00	0,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	602.339.807,00	602.339.807,00	0,00	0,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	575.839.807,00	575.839.807,00	0,00	0,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.969.009.302,00	3.969.009.302,00	0,00	0,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.006.870.486,00	1.006.870.486,00	0,00	0,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	774.595.898,00	774.595.898,00	0,00	0,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	310.359.569,00	310.359.569,00	0,00	0,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	1.105.363.163,00	1.105.363.163,00	0,00	0,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	771.820.186,00	771.820.186,00	0,00	0,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	181.000.000,00	181.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.074.216.925,00	1.074.216.925,00	0,00	0,00

NO URUT	U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.004.065.925,00	1.004.065.925,00	0,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	63.650.000,00	63.650.000,00	0,00	0,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	4.413.000,00	4.413.000,00	0,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	22.584.514.459,00	22.584.514.459,00	0,00	0,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	22.584.514.459,00	22.584.514.459,00	0,00	0,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	17.400.000.000,00	17.400.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	17.400.000.000,00	17.400.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.550.000.000,00	7.550.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	7.550.000.000,00	7.550.000.000,00	0,00	0,00
4.1.2	Retribusi Daerah	23.247.694.400,00	23.247.694.400,00	0,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	16.361.283.000,00	16.361.283.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.515.000.000,00	10.515.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	2.335.500.000,00	2.335.500.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.576.818.000,00	2.576.818.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

NO URUT	U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	498.465.000,00	498.465.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.382.411.400,00	2.382.411.400,00	0,00	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	353.588.000,00	353.588.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	71.798.400,00	71.798.400,00	0,00	0,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	706.525.000,00	706.525.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.504.000.000,00	4.504.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.036.211.026,00	15.036.211.026,00	0,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	15.036.211.026,00	15.036.211.026,00	0,00	0,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	14.999.742.026,00	14.999.742.026,00	0,00	0,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	36.469.000,00	36.469.000,00	0,00	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	154.730.407.900,00	154.730.407.900,00	0,00	0,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.149.440.000,00	10.149.440.000,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	92.915.000,00	92.915.000,00	0,00	0,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	56.525.000,00	56.525.000,00	0,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	8.079.050.000,00	8.079.050.000,00	0,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	8.079.050.000,00	8.079.050.000,00	0,00	0,00

NO URUT	U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.490.853.400,00	3.490.853.400,00	0,00	0,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.490.853.400,00	3.490.853.400,00	0,00	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	6.029.000.000,00	6.029.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6.029.000.000,00	6.029.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	86.736.638.000,00	86.736.638.000,00	0,00	0,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	86.736.638.000,00	86.736.638.000,00	0,00	0,00
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	40.205.626.500,00	40.205.626.500,00	0,00	0,00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	40.205.626.500,00	40.205.626.500,00	0,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.960.870.116.967,00	1.960.870.116.967,00	0,00	0,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.856.843.116.967,00	1.856.843.116.967,00	0,00	0,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.497.129.711.967,00	1.497.129.711.967,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	27.476.856.967,00	27.476.856.967,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	995.519.760.000,00	995.519.760.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	182.410.955.000,00	182.410.955.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	291.722.140.000,00	291.722.140.000,00	0,00	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	25.925.549.000,00	25.925.549.000,00	0,00	0,00
4.2.01.02.01	DID	25.925.549.000,00	25.925.549.000,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	333.787.856.000,00	333.787.856.000,00	0,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	333.787.856.000,00	333.787.856.000,00	0,00	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.027.000.000,00	104.027.000.000,00	0,00	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	78.083.000.000,00	78.083.000.000,00	0,00	0,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	78.083.000.000,00	78.083.000.000,00	0,00	0,00

NO URUT	U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	25.944.000.000,00	25.944.000.000,00	0,00	0,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	25.944.000.000,00	25.944.000.000,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	97.383.883.000,00	97.383.883.000,00	0,00	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	5.803.283.000,00	5.803.283.000,00	0,00	0,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.803.283.000,00	5.803.283.000,00	0,00	0,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.803.283.000,00	5.803.283.000,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	91.580.600.000,00	91.580.600.000,00	0,00	0,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	91.580.600.000,00	91.580.600.000,00	0,00	0,00
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	91.580.600.000,00	91.580.600.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.305.170.393.786,00	2.305.170.393.786,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	2.869.560.289.945,00	2.669.560.289.945,00	(200.000.000.000,00)	(6,97)
5.1	BELANJA OPERASI	1.673.173.182.558,00	1.684.144.860.558,00	10.971.678.000,00	0,66
5.1.1	Belanja Pegawai	968.740.474.085,00	968.740.473.195,00	(890,00)	0,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	642.387.457.736,00	642.387.456.846,00	(890,00)	0,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	493.694.142.895,00	493.664.322.705,00	(29.820.190,00)	(0,01)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	40.289.967.508,00	40.289.967.508,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	10.598.860.135,00	10.598.860.135,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	36.473.486.824,00	36.531.906.824,00	58.420.000,00	0,16
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.557.753.056,00	4.529.153.056,00	(28.600.000,00)	(0,63)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	23.993.064.058,00	23.993.064.058,00	0,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	872.784.033,00	872.784.033,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.138.738,00	6.138.038,00	(700,00)	(0,01)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	27.865.539.573,00	27.865.539.573,00	0,00	0,00

NO URUT	U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.009.078.542,00	1.009.078.542,00	0,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.026.642.374,00	3.026.642.374,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	73.370.806.641,00	73.370.806.641,00	0,00	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	32.099.630.290,00	32.344.630.290,00	245.000.000,00	0,76
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	9.484.953.271,00	9.449.953.271,00	(35.000.000,00)	(0,37)
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.224.996.770,00	2.224.996.770,00	0,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	29.561.226.310,00	29.351.226.310,00	(210.000.000,00)	(0,71)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	222.109.226.931,00	222.109.226.931,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.946.793.545,00	1.946.793.545,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	955.523.185,00	955.523.185,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	213.368.074.047,00	213.368.074.047,00	0,00	0,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.222.486.560,00	1.222.486.560,00	0,00	0,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.175.687.500,00	1.175.687.500,00	0,00	0,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	82.595.584,00	82.595.584,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.470.166.510,00	1.470.166.510,00	0,00	0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.887.900.000,00	1.887.900.000,00	0,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.669.362.128,00	18.669.362.128,00	0,00	0,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	862.240.484,00	862.240.484,00	0,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	85.377.600,00	85.377.600,00	0,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	138.179.620,00	138.179.620,00	0,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	0,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.255.814.500,00	1.255.814.500,00	0,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	16.838.850,00	16.838.850,00	0,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	134.497.650,00	134.497.650,00	0,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.417.500.000,00	0,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	377.934.204,00	377.934.204,00	0,00	0,00

NO URUT	U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.212.921.220,00	3.212.921.220,00	0,00	0,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.412.000.000,00	5.412.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	783.190.720,00	783.190.720,00	0,00	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.302.700,00	57.302.700,00	0,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.876.320,00	6.876.320,00	0,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.144.860,00	103.144.860,00	0,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.384.400,00	6.384.400,00	0,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.042.270,00	1.042.270,00	0,00	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.377.280,00	6.377.280,00	0,00	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00	131.040,00	0,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00	393.120,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	370.161.222,00	370.161.222,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	231.376.058,00	231.376.058,00	0,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.613.600.929,00	2.613.600.929,00	0,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	453.600.929,00	453.600.929,00	0,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	8.806.829.000,00	8.806.829.000,00	0,00	0,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	8.806.829.000,00	8.806.829.000,00	0,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	574.697.024.918,00	585.668.703.808,00	10.971.678.890,00	1,91
5.1.02.01	Belanja Barang	122.778.026.437,00	121.891.772.159,00	(886.254.278,00)	(0,72)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	122.778.026.437,00	121.891.772.159,00	(886.254.278,00)	(0,72)
5.1.02.02	Belanja Jasa	238.151.796.534,00	256.414.872.902,00	18.263.076.368,00	7,67
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	142.133.294.570,00	152.311.295.938,00	10.178.001.368,00	7,16
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	82.545.216.200,00	89.695.216.200,00	7.150.000.000,00	8,66
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.192.692.850,00	2.211.992.850,00	19.300.000,00	0,88
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.464.701.000,00	2.274.326.000,00	(190.375.000,00)	(7,72)

NO URUT	U R A I A N	J U M L A H (R p .)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(R p .)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	142.750.000,00	127.750.000,00	(15.000.000,00)	(10,51)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.002.064.000,00	3.972.064.000,00	(30.000.000,00)	(0,75)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.175.439.500,00	1.264.939.500,00	89.500.000,00	7,61
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	172.660.000,00	372.660.000,00	200.000.000,00	115,83
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.989.674.900,00	3.851.324.900,00	861.650.000,00	28,82
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Dacrah	333.303.514,00	333.303.514,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	33.271.227.531,00	33.485.523.031,00	214.295.500,00	0,64
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	392.000.000,00	392.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.142.512.106,00	6.367.388.606,00	224.876.500,00	3,66
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.659.152.405,00	22.628.752.405,00	(30.400.000,00)	(0,13)
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.077.563.020,00	4.097.382.020,00	19.819.000,00	0,49
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	86.679.679.616,00	80.063.240.916,00	(6.616.438.700,00)	(7,63)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86.679.679.616,00	80.063.240.916,00	(6.616.438.700,00)	(7,63)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.734.424.800,00	19.731.424.800,00	(3.000.000,00)	(0,02)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.525.874.800,00	18.515.874.800,00	(10.000.000,00)	(0,05)
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.208.550.000,00	1.215.550.000,00	7.000.000,00	0,58
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	74.081.870.000,00	74.081.870.000,00	0,00	0,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	74.081.870.000,00	74.081.870.000,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	128.224.867.555,00	128.224.867.555,00	0,00	0,00
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05.04.01	Belanja Hibah Uang kepada BUMD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.387.300.000,00	35.387.300.000,00	0,00	0,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	24.095.300.000,00	24.095.300.000,00	0,00	0,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	0,00

NO URUT	U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.640.000.000,00	10.640.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	91.580.600.000,00	91.580.600.000,00	0,00	0,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	91.580.600.000,00	91.580.600.000,00	0,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.231.967.555,00	1.231.967.555,00	0,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.231.967.555,00	1.231.967.555,00	0,00	0,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.510.816.000,00	1.510.816.000,00	0,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	388.900.000,00	769.614.000,00	380.714.000,00	97,90
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	388.900.000,00	469.614.000,00	80.714.000,00	20,75
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	595.166.000,00	448.022.000,00	(147.144.000,00)	(24,72)
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	595.166.000,00	448.022.000,00	(147.144.000,00)	(24,72)
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	526.750.000,00	293.180.000,00	(233.570.000,00)	(44,34)
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	184.680.000,00	184.680.000,00	100,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	526.750.000,00	108.500.000,00	(418.250.000,00)	(79,40)
5.2	BELANJA MODAL	697.474.209.247,00	505.658.531.247,00	(191.815.678.000,00)	(27,50)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.952.320.524,00	70.417.573.011,00	(2.534.747.513,00)	(3,47)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.127.484.000,00	3.960.081.000,00	(167.403.000,00)	(4,06)
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	167.403.000,00	0,00	(167.403.000,00)	(100,00)
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	3.960.081.000,00	3.960.081.000,00	0,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.747.406.000,00	3.055.806.000,00	(691.600.000,00)	(18,46)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.747.406.000,00	3.055.806.000,00	(691.600.000,00)	(18,46)
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.070.000.000,00	618.700.000,00	(451.300.000,00)	(42,18)
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	82.400.000,00	93.000.000,00	10.600.000,00	12,86
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	21.600.000,00	29.700.000,00	8.100.000,00	37,50

NO URUT	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	966.000.000,00	496.000.000,00	(470.000.000,00)	(48,65)
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.295.290.463,00	3.382.072.740,00	86.782.277,00	2,63
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	852.433.870,00	839.973.870,00	(12.460.000,00)	(1,46)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.029.283.126,00	2.128.525.403,00	99.242.277,00	4,89
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	413.573.467,00	413.573.467,00	0,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	720.432.982,00	650.182.982,00	(70.250.000,00)	(9,75)
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	611.307.982,00	411.307.982,00	(200.000.000,00)	(32,72)
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	19.125.000,00	48.875.000,00	29.750.000,00	155,56
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	90.000.000,00	190.000.000,00	100.000.000,00	111,11
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	49.888.924.491,00	48.587.547.701,00	(1.301.376.790,00)	(2,61)
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	42.908.175.000,00	42.908.175.000,00	0,00	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	6.980.749.491,00	5.679.372.701,00	(1.301.376.790,00)	(18,64)
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	584.183.450,00	584.183.450,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	584.183.450,00	584.183.450,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.578.385.138,00	6.638.785.138,00	60.400.000,00	0,92
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.025.505.138,00	4.085.905.138,00	60.400.000,00	1,50
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.552.880.000,00	2.552.880.000,00	0,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	0,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.897.939.000,00	2.897.939.000,00	0,00	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.897.939.000,00	2.897.939.000,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.070.413.195,00	62.089.482.708,00	(3.980.930.487,00)	(6,03)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	63.929.480.395,00	59.948.549.908,00	(3.980.930.487,00)	(6,23)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	63.929.480.395,00	59.948.549.908,00	(3.980.930.487,00)	(6,23)

NO URUT	U R A I A N	J U M L A H (R p .)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(R p .)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.190.932.800,00	1.190.932.800,00	0,00	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.190.932.800,00	1.190.932.800,00	0,00	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	558.202.675.528,00	372.902.675.528,00	(185.300.000.000,00)	(33,20)
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	545.303.465.773,00	360.003.465.773,00	(185.300.000.000,00)	(33,98)
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	484.716.594.793,00	340.883.722.793,00	(143.832.872.000,00)	(29,67)
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	60.586.870.980,00	19.119.742.980,00	(41.467.128.000,00)	(68,44)
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.499.209.755,00	10.499.209.755,00	0,00	0,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.499.209.755,00	10.499.209.755,00	0,00	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	0,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	248.800.000,00	248.800.000,00	0,00	0,00
5.2.05.06	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	113.800.000,00	113.800.000,00	0,00	0,00
5.2.05.06.01	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	113.800.000,00	113.800.000,00	0,00	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	45.000.000.000,00	25.844.000.000,00	(19.156.000.000,00)	(42,57)
5.3.1	BELANJA TIDAK TERDUGA	45.000.000.000,00	25.844.000.000,00	(19.156.000.000,00)	(42,57)
5.3.01.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	45.000.000.000,00	25.844.000.000,00	(19.156.000.000,00)	(42,57)
5.3.01.01.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	45.000.000.000,00	25.844.000.000,00	(19.156.000.000,00)	(42,57)
5.4	BELANJA TRANSFER	453.912.898.140,00	453.912.898.140,00	0,00	0,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	7.716.520.040,00	7.716.520.040,00	0,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.391.608.100,00	5.391.608.100,00	0,00	0,00

NO URUT	U R A I A N	J U M L A H (Rp.)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.391.608.100,00	5.391.608.100,00	0,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.324.911.940,00	2.324.911.940,00	0,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.324.911.940,00	2.324.911.940,00	0,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	446.196.378.100,00	446.196.378.100,00	0,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	446.196.378.100,00	446.196.378.100,00	0,00	0,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	333.787.856.000,00	333.787.856.000,00	0,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	112.408.522.100,00	112.408.522.100,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.869.560.289.945,00	2.669.560.289.945,00	(200.000.000.000,00)	(6,97)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(564.389.896.159,00)	(364.389.896.159,00)	200.000.000.000,00	(35,44)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	579.389.896.159,00	379.389.896.159,00	(200.000.000.000,00)	(34,52)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	79.389.896.159,00	79.389.896.159,00	0,00	0,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	3.578.096.857,00	3.578.096.857,00	0,00	0,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	3.578.096.857,00	3.578.096.857,00	0,00	0,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.685.300.000,00	1.685.300.000,00	0,00	0,00
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	1.685.300.000,00	1.685.300.000,00	0,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	74.126.499.302,00	74.126.499.302,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	54.677.201.754,00	54.677.201.754,00	0,00	0,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	8.884.949.688,00	8.884.949.688,00	0,00	0,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	10.564.347.860,00	10.564.347.860,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	500.000.000.000,00	300.000.000.000,00	(200.000.000.000,00)	(40,00)

NO URUT	U R A I A N	J U M L A H (R p .)		B E R T A M B A H (B E R K U R A N G)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(R p .)	%
1	2	3	4	5	6
6.1.04.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	500.000.000.000,00	300.000.000.000,00	(200.000.000.000,00)	(40,00)
6.1.04.01.06	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	500.000.000.000,00	300.000.000.000,00	(200.000.000.000,00)	(40,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	579.389.896.159,00	379.389.896.159,00	(200.000.000.000,00)	(34,52)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	564.389.896.159,00	364.389.896.159,00	(200.000.000.000,00)	(35,44)
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Watampone, 17 Mei 2021


A. FAHSAR M. PADJALANGI